



Publik Masih...

Rancangan dapil pertama terdiri dari dua daerah pemilihan dengan 46 kursi. Dapil satu terdiri dari Kecamatan Kraton, Mantrijeron, dan Mergangsan dengan jumlah kursi sembilan; dapil kedua dengan Gondomanan, Ngampilan, Pakualaman, Wirobrajan dengan tujuh kursi. Sedangkan dapil ketiga antara lain Kecamatan Gedongtengen, Jetis, Tegalrejo dengan delapan kursi, sementara dapil keempat dengan Danurejan dan Gondokusuman dengan enam kursi yang diperebutkan. Terakhir yakni dapil kelima dengan Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo dengan 10 kursi.

Perbedaannya dengan sistem yang berlaku pada 2014 lalu hanya soal jumlah kursi yang tersebar di dapil empat dan dapil lima serta catatan jumlah penduduknya. Pada Pemilu 2014 lalu, dapil empat mendapatkan empat kursi dan dapil lima dengan sembilan kursi di Dewan.

Hampir semua partai politik yang hadir menyatakan kecenderungannya

pada pada opsi dapil pertama meskipun disertai dengan berbagai tambahan kecuali PPP. Partai yang identik dengan warna hijau ini cenderung pada opsi dapil ketiga dengan pendapat seharusnya Kotagede dan Umbulharjo dipisah karena karakteristiknya yang berbeda.

Namun, hal ini bisa menjadi wacana untuk usulan dapil di pemilu selanjutnya. Hal ini sebagaimana yang dibacakan oleh Komisioner KPU Kota Jogja, Divisi Pendidikan Politik dan Humas, Sri Surani soal catatan diskusi ini yang juga disepakati oleh para peserta. "Sedangkan dari Kesatuan Bangsa dan Politik [Kesbangpol] juga menyarankan pada usulan satu, perubahan dapil bisa dilakukan setelah pemilu selesai dan kompetisi juga diharapkan aman dan tidak melanggar aturan," ujar Rani.

Ia mengatakan jika semua masukan yang telah disampaikan akan disampaikan ke KPU RI sebagai bagian pertimbangan dari penataan dapil ini.

Haris Wibowo, perwakilan PDIP menjelaskan kecenderungan pihaknya atas rancangan pertama yang mirip dengan dapil lama karena selama ini sudah terbukti bekerja dengan baik. Karena itu hanya diperlukan penataan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam politik yang berlangsung. "Yang lama kan sudah teruji selama ini," katanya.

Perwakilan organisasi masyarakat Muhammadiyah juga mengusulkan agar penataan dapil dilakukan beberapa tahun sebelum pelaksanaan pemilu.

"Jika dilakukan mendadak, dimungkinkan ada banyak parpol yang sudah melakukan 'investasi' di wilayah tertentu untuk memperoleh suara pada pemilu tetapi mungkin dirugikan. Dengan waktu yang cukup, maka mereka bisa melakukan persiapan lebih baik," kata Perwakilan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jogja Samik Sandi. (JIBI/Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005